

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, RETRIBUSI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2017-2020)

Siti Hafizah¹Yunilma²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta

Email : sitihafizah512@gmail.com, yunilmaaa@gmail.com

ABSTRAK

Selama tahun 2017-2020 terjadi kenaikan/penurunan anggaran dan realisasi belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, hal ini disebabkan ketidaksiapan TAPD mengelola refocusing anggaran. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh dana alokasi khusus, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Populasi dan sampel penelitian meliputi pemerintahan daerah di 12 Kabupaten dan 7 Kota di Sumatera Barat. Data diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus, retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci : DAK, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi di daerah tersebut, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut secara efisien dan efektif, serta mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan hak untuk memanfaatkan sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan dan hak tersebut merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah membutuhkan sumber-sumber penerimaan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang no. 33 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah [1].

Belanja modal merupakan pengeluaran uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap seperti gedung, tanah, peralatan, properti yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dimana aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintah yang bermanfaat secara ekonomis, sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Belanja modal modal pada suatu pemerintahan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya dana alokasi khusus, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Realisasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2017-2020. Dimana pada tahun 2017 persentase realisasi belanja modal yang berada dibawah 50% yaitu hanya pada Kota Bukittinggi, Pada tahun 2018 hanya pada Kota Sawahlunto yang persentase realisasi dibawah 60%, tahun 2019 rata-rata semua daerah berada diatas 70%, dan tahun 2020 Kota Solok memiliki persentase dibawah 30%.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal yaitu dana alokasi khusus, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus merupakan dana bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Huda [2] menyatakan DAK tidak mempengaruhi belanja modal, dana alokasi khusus digunakan secara khusus untuk program prioritas pusat dalam rangka pembangunan nasional sehingga diharapkan pembangunan secara fisik di daerah setiap tahunnya meningkat pula. Dalam kenyataannya dengan jumlah DAK yang diterima pemerintah daerah cukup besar tidak diimbangi dengan efektifnya tata kelola implementasi DAK bagi pembangunan di daerah. Justru DAK yang begitu besar diterima oleh pemerintah daerah masih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai bukan untuk belanja modal.

Retribusi daerah berfungsi sebagai anggaran daerah, stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Abbas [3] menyatakan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Adanya peningkatan iuran retribusi daerah, berdampak kepada peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah dimana nantinya pungutan tersebut nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal agar terciptanya pelayanan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat yang disebabkan oleh bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang dimana dapat meningkatkan barang dan jasa yang disebabkan oleh berbagai faktor. M. Agus [4] menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan apabila memiliki belanja modal yang besar. Hal ini dimungkinkan karena tidak meratanya pembangunan, sehingga masih banyak daerah tertinggal yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas pelayanan beserta fasilitas publik, maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman sehingga dapat menjalankan kegiatan usahadengan lancar, dengan begitu jumlah pendapatan pajak didaerah dapat terserap secara baik terutama dalam pembangunan daerah. Pesatnya perkembangan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan sikap kemandirian daerah dalam membiayai aktivitasnya, terutama dalam hal keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh dana alokasi khusus, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Agency Theory

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal pihak pertama dan agen sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan tugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen, sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal.

Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. APBD tersebut yang akan menjadi alat kontrol bagi DPRD untuk memantau kinerja Pemda.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan realisasi APBD pemerintah periode 2017-2020. Data penelitian yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu menggunakan semua populasi sebagai sampel yang meliputi 12 Kabupaten dan 7 Kota di Sumatera Barat.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sebagai syarat dalam analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji normalitas

Berdasarkan hasil uji normal residual terdapat hasil nilai asymp.sig. (2-tailed) pada data residual $< 0,05$,dengan demikian variabel penelitian dana alokasi khusus, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi telah terdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas

Berdasarkan hasil yang didapat bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan telah memiliki tolerance ≥ 10 dan nilai VIF ≤ 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak teridentifikasi atau bebas dari gejala multikolinearitas.

Hasil uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil yang didapat bahwa hasil menunjukkan $\leq d \leq 4-du$ bahwa $1,710 \leq 1,715 \leq 2,29$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi dan tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat dilaksanakan.

Hasil uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil yang didapat bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak untuk dipakai serta dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

variabel	Koef.R e Gresi	Sig.	Hasil
LN_DAK	0,522	0,000	Berpengaruh
LN_RD	0,137	0,002	Berpengaruh
PE	0,280	0,502	Tidak Berpengaruh

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan hasil bahwa variabel dana alokasi khusus (X1) berpengaruh terhadap belanja modal hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Surakhman [5], Miftahul Abid [6] bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Retribusi daerah (X2) berpengaruh terhadap belanja modal, penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Abbas [3] bahwa belanja modal berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tari [7]

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Saran pada penelitian ini adalah Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak bervariasi, disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel independen seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Lain-lain PAD yang sah.

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah rentang waktu yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang relevan. Sampel dari penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitiannya. Dengan menggabungkan beberapa Provinsi atau Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Zahari, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 18, no. 3, p. 635, 2018, doi: 10.33087/jiubj.v18i3.531.
- [2] S. Huda and A. Sumiati, "Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah," *J. Wahana Akunt.*, vol. 14, no. 1, pp. 85–100, 2019, doi: 10.21009/wahana.14.016.
- [3] D. S. Abbas, A. Eksandy, I. Hidayat, and N. Larasati, "Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Financ. J. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 154–168, 2020, doi: 10.37403/financial.v6i2.146.
- [4] I. D. P. M. Agus Sudrajat, "analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal kabupaten Ngawi," vol. 1, no. 1, pp. 56 – 67, 2017.
- [5] A. Surakhman, A. Djazuli, and Choiriyah, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang," *Kolegial*, vol. 7, no. 2, pp. 150–166, 2019.
- [6] W. A. Miftahul Abid, Sri Rahayu, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015)," vol. 5, no. 1, pp. 753–759, 2018.
- [7] S. T. Tari Natalia Nataisya Lontoh, Amran. T. Naukoko, "the Influence of Economic Growth , Local Revenue , and General," vol. 16, no. 03, pp. 736–744, 2016.
10.37403/financial.v6i2.146.